

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ALAMSYAH SAHABUDDIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **844081**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.320.147.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 253.253.000
4. Tanah Seluas 131.6 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 166.894.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 650.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 105.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 50.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 3.125.147.000

**III. HUTANG**

Rp. 178.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.947.147.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.